

POSTMODERNISME DALAM KEARSIPAN

Oleh: Khoerun Nisa Fadillah, S.IP

Abstract

This research aims to analyze and describe the postmodernism in the archives. This is a descriptive qualitative research. Data collection used was literature. The technique of data analysis used was inductive analysis technique. The result showed important conclusions, namely: postmodernism archival thinking considers: 1) archives as a process rather than a product and shaping rather than documenting; 2) archival work on how represent the reality rather than keep the evidential accountability and how construct the nation collective memory rather than guard the government collective memory; 3) archivists as auditors rather than keepers and as constructors rather than guardians.

Keyword: *postmodernism, archives, archival work, archivists.*

A. Latar Belakang

Ketika pekerjaan kearsipan hanya dilihat sebagai pekerjaan tentang bagaimana arsip dinamis didaftar dan ditemukan kembali secara cepat dan tepat, maka jangan heran jika kemudian arsiparis akan tergeser oleh para profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ketika pekerjaan kearsipan hanya dilihat sebagai pekerjaan tentang bagaimana arsip statis dari rezim yang berkuasa, diterima, disimpan, dan dijaga, maka jangan heran jika arsiparis hanya dilihat sebagai seorang penjaga yang tidak bisa diharapkan dapat membangun rumah-rumah memori yang mencerminkan kehidupan masyarakat secara akurat. Untuk itu, perlu dipikirkan kembali, perlu didefinisikan kembali, perlu diposisikan kembali, eksistensi kearsipan agar lebih mapan secara intelektual maupun aktual. Maka pada tataran ini, postmodernisme dapat membantu menjawab permasalahan-permasalahan semacam itu dan menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana kearsipan dapat dikembangkan kedepannya.

Postmodernisme itu sendiri merupakan suatu paham yang muncul sebagai kritik atas modernisme. Bertolakbelakang dengan modernisme yang mengusung ide keuniversalan, narasi-narasi besar (metanarasi), rasionalitas, totalitas, dan absolutisme, postmodernisme justru menekankan pada kelokalan, narasi-narasi kecil, dekonstruksi, differensiasi dan relativisme³⁵. Sebagai sebuah “isme” atau “paham”, postmodernisme

³⁵ Selengkapnya lihat Jean Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (USA: Manchester University Press, 1984).

berkembang ke berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang kearsipan, postmodernisme berkembang pada tahun 1980-1990-an yaitu ketika para peneliti kearsipan meneliti sifat, arti, dan peran arsip dalam masyarakat dengan menggunakan teori dan mode analisis postmodernisme³⁶. Bahkan Terry Cook menyatakan bahwa postmodernisme merupakan solusi dalam menjawab persoalan kearsipan. Bagaimana tidak, Cook beranggapan bahwa³⁷:

“Using remorseless logical analysis, postmodernist reveal the illogic of allegedly rational texts. The context behind the text, the power relationships shaping the documentary heritage, and indeed the document’s structure, resident information system, and narrative conventions are more important than the objective thing its self or its content. Fact in text cannot be separated from their ongoing and past interpretation , nor author from subject or audience, nor author from authoring, nor authoring from context. Nothing is neutral. Nothing is impartial. Nothing is objective. Everything is shaped, presented, represented, re-presented, symbolized, signified, signed, constructed by the speaker, photographer, writer, for a set purpose. No text is a mere innocent by product of action as Jenkinson claimed, but rather a consciously constructed product, although that consciousness may be so transformed in to semi or even unconscious patterns of social behaviour, organization process, and information presentation that the link to external realities and power relationships is quite hidden”.

Oleh karena latar belakang masalah seperti tersebut di ataslah yang mendorong penulis untuk mengangkat **Postmodernisme dalam Kearsipan** sebagai judul dari karya tulis ini.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Agar fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat terjaga dengan baik, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana postmodernisme memandang arsip?
2. Bagaimana postmodernisme memandang pekerjaan kearsipan?
3. Bagaimana postmodernisme memandang arsiparis?

³⁶ Tom Jackman, *Activist, Archivist and The Limits of Postmodern Thought* (ARST 573: Archival Systems and The Profession, 2011), h. 6.

³⁷ Terry Cook, *Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts* (Netherland: Kluwer Academic Publishers, Archival Science 1:3-24, 2001), h.7.

Di samping itu, agar ruang lingkup masalah tidak meluas, maka penulis membatasi postmodernisme yang dimaksud adalah postmodernisme sebagai sebuah paham atau filsafat pemikiran manusia terhadap realitas kehidupan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pandangan postmodernisme terhadap arsip;
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pandangan postmodernisme terhadap pekerjaan kearsipan;
3. Menganalisis dan mendeskripsikan pandangan postmodernisme terhadap arsiparis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan postmodernisme dalam kearsipan.

D. Kerangka Teori

1. Mengenal Postmodernisme

Postmodernisme merupakan babak baru dalam sejarah pemikiran manusia modern. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Eagleton sebagaimana berikut:

*“Postmodernism signals the death of such ‘metanarratives’ whose secretly terroristic function was to ground and legitimate the illusion of ‘universal’ human history. We are now in the process of waking from the nightmare of modernity, with its manipulative reason and fetish of the totality, in to the laid back pluralism of the postmodern, that heterogenous range of life style and language game which has renounced the nostalgic urge to totalize and legitimate it self...science and philoshopy must jettison their grandiose metaphysical claims and view them selves modestly as just another set of narratives”.*³⁸

Postmodernisme muncul sebagai kritik atas kegagalan manusia modern (kehidupan modernitas) dalam menciptakan situasi sosial yang lebih baik, kondusif, dan berkeadilan sosial³⁹. Rasio manusia yang oleh masyarakat modern diyakini sebagai kekuatan otonom, mengatasi kekuatan metafisis dan transendental, mengatasi

³⁸ Selengkapnya lihat David Harvey, *The Condition of Postmodernity: An Enquiry in to the Origin of Cultural Change*. (USA and UK: Blackwell Publisher, 1992).

³⁹ George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Muhammad Taufik (Yogyakarta: Juxtapose, 2003), h. 31.

semua pengalaman yang bersifat partikular, dan dianggap menghasilkan kebenaran mutlak (absolut), dan tidak terikat waktu, ditentang oleh para pemikir postmodernisme ternama seperti: Michael Foucault, Jacques Derrida, Jean Francois Lyotard, dan Richard Rorty.⁴⁰

Sebagai sebuah “isme” yang mempengaruhi filsafat pemikiran manusia, postmodernisme telah mendorong munculnya ‘pembacaan ulang’ pada setiap dasar kehidupan manusia⁴¹. Hal ini berujung pada sikap kritis untuk mengkaji ulang setiap bentuk kebenaran yang selama ini diterima secara apa adanya. Terminologi inilah yang kemudian dikenal dengan metode dekonstruksi yang dalam banyak hal diusung oleh Derrida.⁴²

Filsafat postmodernisme pertama kali muncul di Perancis pada sekitar tahun 1970-an, terlebih ketika Jean Francois Lyotard menulis pemikirannya tentang kondisi legitimasi era postmodern, di mana narasi-narasi besar (metanarasi) dunia modern (seperti rasionalisme, kapitalisme, dan komunisme) tidak dapat dipertahankan lagi. Nafas utama dari postmodern adalah penolakan atas narasi-narasi besar (metanarasi) yang muncul pada dunia modern dengan ketunggalan terhadap pengagungan akal budi dan mulai memberi tempat bagi narasi-narasi kecil, lokal, tersebar, dan beranekaragam untuk bersuara dan menampakkan dirinya.⁴³

Postmodernisme merubah pandangan manusia terhadap sebuah realitas. Bagi postmodernisme, manusia tidak akan mengetahui realitas yang objektif dan benar, tetapi yang diketahui manusia adalah sebuah versi dari realitas. Oleh karenanya, kebenaran bagi postmodernisme adalah relatif, tidak absolut.

2. Pokok-pokok Pemikiran Postmodernisme

Hans Berten mengungkapkan bahwa pokok pemikiran postmodernisme adalah tentang krisis representasi, *“If there is a common denominator to all these postmodernisms, it is that of a crisis in representation: a deeply felt loss of faith in our ability to represent the real, in the widest sense. No matter whether they are aesthetic, epistemological, moral, or political in nature, the representations that we*

⁴⁰ Selengkapnya lihat Stephen R. Hicks, *Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault* (USA: Scholarly Publishing, 2004).

⁴¹ Bambang I Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 28-32.

⁴² Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, Terjemahan Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), h. 20.

⁴³ Selengkapnya lihat Jean Francois Lyotard, *loc. cit.*

used to rely on can no longer be taken for granted".⁴⁴ Sebelumnya, Berten menguraikan beberapa pemikiran tokoh-tokoh postmodernisme seperti⁴⁵:

- a. Barthes dan Derrida yang berorientasi pada masalah linguistik khususnya bahasa tulisan (tekstual) menekankan bahwa "*The attack on foundationalist notions of language, representation, and the subject is combined with a strong emphasis on what in Derrida's 'Structure, sign, and play in the discourse of the human sciences' had been called 'freeplay'—the extension ad infinitum of the 'interplay of signification' in the absence of transcendent signifiers, of metaphysical meaning—and on intertextuality*". Dalam hal ini, postmodernisme memandang teks sebagai ruang multidimensi di mana berbagai tulisan tidak ada yang asli, semuanya bercampur dan berbenturan sebagai sebuah jaringan kutipan yang diambil dari pusat-pusat kebudayaan yang tak terhitung banyaknya.
- b. Foucault dan Lacan yang berasumsi bahwa "*a reality of textuality and signs, of representations that do not represent. Here, however, the emphasis is on the workings of power, and the constitution of the subject*". Dari perspektif postmodernisme ini, pengetahuan tidak lagi dianggap netral dan objektif melainkan terikat dengan kekuasaan.

Sementara itu, Ihab Hassan menyebutkan 11 (sebelas) pokok pemikiran postmodernisme sebagaimana berikut⁴⁶:

- a. *Indeterminacy*;
- b. *Fragmentation*;
- c. *Decanonization*;
- d. *Self-less-ness, Depth-less-ness*;
- e. *The Unpresentable, Unrepresentable*;
- f. *Irony*;
- g. *Hybridization*;
- h. *Carnivalization*;
- i. *Performance, Participation*;
- j. *Constructionism*;
- k. *Immanence*.

⁴⁴ Hans Berten, *The Idea of The Postmodern: A History* (London and Newyork: Routledge, 1995), h. 10.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 6-8.

⁴⁶ Selengkapnya lihat Ihab Hassan, *Pluralisme in Postmodern Perspective*, Chicago Journal: Critical Inquiry, Vol. 12 No. 3, Spring (USA: The University of Chicago Press, 1986).

Selanjutnya, Turner menjelaskan bahwa salah satu pokok pemikiran postmodernisme adalah untuk mengkritik pengetahuan manusia modern mengenai 3 (tiga) hal⁴⁷:

- a. Masalah representasi, yaitu apakah bahasa mampu membantu pemahaman kita mengenai realitas;
- b. Masalah kekuasaan dan *vested interest*, karena terbukti ilmu tidak berkembang secara netral dan karena itu ilmu harus dipahami dalam konteks kulturalnya;
- c. Masalah kontinuitas, karena ada diskontinuitas dalam pengetahuan.

3. Kearsipan

Akar kata kearsipan berasal dari kata dasar “arsip”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah arsip diartikan sebagai dokumen tertulis (surat, akta, dll.), lisan (pidato, ceramah, dll.), atau bergambar (foto, film, dll.) dari waktu yang lampau, disimpan dalam media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket komputer, dll.), biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi⁴⁸. Sedangkan dalam *International Glossary of Archival Terminology*, arsip diartikan sebagai, “*recorded information regardless of form or medium created, received and maintained by an agency, institution, organization, or individual in pursuance of its legal obligation or in the transaction of business of any kind*”⁴⁹. Adapun pengertian arsip dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁵⁰.

Penggunaan imbuhan ke-an dalam istilah “ke-arsip-an” menyatakan makna hal atau keadaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengartikan istilah kearsipan sebagai hal-hal

⁴⁷ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 112.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/arsip>, diakses 13 Juni 2013.

⁴⁹ Eric Ketelaar, *Archival and Records Management Legislations and regulations: a RAMP Study with Guidelines, For the General Information Programme and UNISIST* (Paris: Unesco, 1985), h. 6.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1 Ayat (2).

yang berkenaan dengan arsip⁵¹. Dengan demikian, berbicara kearsipan berarti dapat berbicara tentang arsip itu sendiri, pekerjaannya, orangnya, ataupun hal-hal lain yang berkenaan dengan arsip. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, istilah kearsipan yang dimaksud yaitu meliputi arsip itu sendiri, pekerjaan di bidang arsip (pekerjaan kearsipan), dan orang yang berkerja di bidang arsip (arsiparis).

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Disebut penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian⁵², yaitu berupaya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai postmodernisme dalam kearsipan. Penelitian ini juga disebut penelitian kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami pandangan postmodernisme terhadap arsip, pekerjaan kearsipan, dan arsiparis, secara mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur terhadap bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa kategorisasi maupun proposisi⁵³.

F. Hasil dan Analisis

1. Pandangan Postmodernisme terhadap Arsip

Postmodernisme yang mempertanyakan kemampuan bahasa dalam merepresentasikan realitas dan mempertanyakan kenetralan pengetahuan dari pengaruh kekuasaan, telah mengilhami pemikir-pemikir kearsipan untuk juga mempertanyakan kemampuan arsip dalam merepresentasikan realitas dan mempertanyakan kenetralan arsip dari pengaruh kekuasaan.

Jika selama ini arsip dipandang sebagai rekaman informasi yang faktual dan apa adanya, maka bagaimana kita menjelaskan tentang arsip yang diada-adakan, direkayasa, dan dibuat sedemikian rupa, hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban administrasi semata dan ironisnya arsip semacam itu diterima sebagai kebenaran

⁵¹ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

⁵² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55.

⁵³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 209.

dalam konteks akuntabilitas.⁵⁴ Jika selama ini arsip dipandang sebagai memori kolektif yang netral, maka bagaimana kita dapat menjelaskan tentang adanya arsip yang distatiskan berdasarkan perspektif pemerintah, dianggap merepresentasikan memori kolektif bangsa⁵⁵, disajikan untuk melegitimasi kekuasaan dan ironisnya arsip semacam itu diterima sebagai kebenaran dalam konteks kesejarahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, postmodernisme memiliki pandangan tersendiri terhadap arsip, yaitu:

- a. Arsip lebih dilihat sebagai sebuah proses daripada sebuah produk (*process rather than product*);

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Cook, “*State another way, archival theoretical discourse is shifting from product to process, from structure to function, from archives to archiving, from the record to the recording context, from the “natural” residue or passive by product of administrative activity to the consciously constructed and actively mediated “archivalisation” of social memory*”.⁵⁶

Maksud dari melihat arsip sebagai sebuah proses daripada sebuah produk adalah bahwa arsip yang selama ini hanya dilihat sebagai sebuah produk atau hasil bahkan ada yang menganggap *by-product* (hasil samping) dari kegiatan administrasi hanya akan memposisikan arsip sebagai sesuatu yang pasif, terbatas oleh struktur dan isi (*content*) arsip secara fisik, tanpa memperhatikan bagaimana proses fungsional atau konteks penciptaannya, bagaimana latar belakang, suasana, sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang muncul ketika pertama kali arsip itu

⁵⁴ Oleh karenanya, seorang pakar Ilmu Pemerintahan, Taliziduhu Ndraha mengantisipasi kondisi semacam itu dengan mengungkapkan bahwa akuntabilitas saja tidak cukup untuk membangun suatu pemerintahan yang bertanggung jawab, dibutuhkan bentuk pertanggungjawaban lain seperti *obligativeness*, dan *causativeness*. Baginya, akuntabilitas yang dapat dipenuhi dengan adanya laporan, kuitansi, dan berita acara, hanya menjawab pertanggungjawaban formal belaka, tidak menyentuh pada pertanggungjawaban substansial. Bahkan secara tegas ia menyatakan bahwa akuntabilitas semata-mata tidak menjamin terjadinya kontrol, koreksi atau pembaharuan. Selengkapnya lihat Taliziduhu Ndraha. *Kybernologi Jilid 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 85-172.

⁵⁵ Padahal arsip-arsip semacam itu tidak dapat merepresentasikan memori kolektif sebuah bangsa, karena apa yang dikatakan bangsa sebagaimana dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha adalah masyarakat yang mengikatkan diri dalam sebuah nilai tertinggi yang disepakati bersama dengan sadar. Bangsa adalah puncak perkembangan suatu masyarakat, melalui proses budaya. Sudah barang tentu, proses budaya tersebut mustahil terjadi jika masyarakat yang luar biasa besar, kondisi geografiknya sangat heterogen, dan momentum perkembangannya amat pincang, seperti Indonesia, dikelola secara dan melalui skenario sentralistik (*government oriented*). Karenanya perpektif pemerintah saja tidak cukup untuk menentukan memori kolektif sebuah bangsa. Selengkapnya mengenai konsep bangsa, lihat *ibid.*, h. 30-31.

⁵⁶ Terry Cook, *op. cit.*, h. 4.

diciptakan⁵⁷. Hal inilah yang membuat arsip seolah-olah tidak berdaya dalam merepresentasikan realitas. Bagaimana tidak, sebagaimana dikemukakan di awal pembahasan, arsip dapat dibuat secara “paksa” untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas, struktur dan isinya dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar dan meyakinkan, tetapi konteksnya dalam rangka manipulasi pertanggungjawaban administrasi tidak muncul dan tidak tersampaikan. Padahal daya arsip dalam merepresentasikan realitas hanya dapat muncul jika struktur dan isi arsip melekat pada konteksnya⁵⁸. Oleh karenanya, pandangan terhadap arsip harus dirubah dengan tidak lagi melihat arsip sebagai sebuah produk melainkan sebuah proses. Dengan demikian, arsip tidak lagi dilihat sebagai sebuah materi fisik yang pasif tetapi lebih sebagai sebuah aktivitas fungsional yang aktif, arsip tidak lagi terbatas oleh struktur dan isi tetapi lebih terikat dengan konteksnya, arsip tidak lagi dijadikan objek manipulasi, melainkan sebagai subjek dalam membangun sistem administrasi yang bertanggungjawab. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Cook:

“At the heart of the new paradigm is a shift away from viewing records as static physical object, and towards understanding them as dynamic virtual concepts; a shift away from looking at records as passive products of human or administrative activity and toward considering records as active agents themselves in the formation of human and organizational memory; a shift equally away from seeing the context of records creation resting within stable hierarchical organizations to situating records within fluid horizontal networks of work flow functionality”.⁵⁹

⁵⁷ Terry Cook, *What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and The Future Paradigm Shift* (Archivaria, The Journal of The Association of Canadian Archivist, 1997), h. 45.

⁵⁸ Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, istilah “struktur” diartikan sebagai bentuk (format fisik) dan susunan (format intelektual) arsip yang diciptakan dalam media sehingga memungkinkan isi arsip

dikomunikasikan, sedangkan “isi” diartikan sebagai data, fakta, atau informasi yang direkam dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi ataupun perseorangan. Adapun “konteks” diartikan sebagai lingkungan administrasi dan sistem yang digunakan dalam penciptaan arsip. Keharusan pemenuhan komponen struktur, isi, dan konteks dalam penciptaan arsip tercantum dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sementara itu, penegasan tentang lebih pentingnya konteks daripada struktur dan isi arsip diungkapkan oleh Terry Cook sebagaimana berikut, *“The context behind the text, the power relationships shaping the documentary heritage, and indeed the document’s structure, resident information system, and narrative conventions are more important than the objective thing its self or its content”*. Lihat Terry Cook, *op. cit.*, h. 7.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 4.

- b. Arsip lebih dilihat membentuk realitas daripada membuktikan realitas (*shaping rather than documenting*);

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Xiaomi, “*Post-modern archival thinking: considers archiving a key feature of society’s communication processes in shaping reality rather than just documenting it*”.⁶⁰

Maksud dari lebih melihat arsip dalam membentuk realitas daripada membuktikan realitas adalah bahwa arsip yang selama ini ditegaskan oleh Jenkinson sebagai hasil alami dari administrasi yang membuktikan tindakan dan transaksi secara murni sehingga dianggap membuktikan memori kolektif secara jujur, netral, berimbang, adil, dan tidak memihak (*impartial evidence*), karenanya perlu dijaga kemurniannya dengan tidak memperkenankan adanya campur tangan (*interference*) atau intervensi dari luar pasca arsip itu diciptakan. Baginya, satu-satunya yang berhak memilah, menilai dan menentukan arsip yang distatiskan adalah pencipta arsip itu sendiri, yaitu lembaga administrasi (pemerintah).⁶¹ Hal inilah yang kemudian ditentang oleh Gerald Halm, baginya pendekatan Jenkinson justru menimbulkan dilema. Jika hak untuk memilah, menilai, dan menentukan hanya diserahkan pada lembaga administrasi (pemerintah), maka mustahil arsip dapat membuktikan memori kolektif secara jujur, netral, berimbang, adil, dan tidak memihak (*impartial evidence*). Kondisi ini justru memberi peluang bagi rezim yang berkuasa untuk menyalahgunakan kekuasaannya dengan memusnahkan arsip yang membuktikan memori kelam mereka dan melestarikan arsip yang melegitimasi kekuasaan mereka. Penyelewengan memori kolektif seperti ini hanya akan menyesatkan pengetahuan sejarah sebuah bangsa.⁶² Oleh karenanya, pandangan terhadap arsip harus dirubah dengan tidak lagi melihat arsip sebagai bukti realitas yang dihasilkan secara alami dari proses administrasi yang netral dan impartial, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai hasil konstruksi manusia secara sadar yang membentuk realitas. Oleh karena itu, bagi postmodernisme tidak ada arsip yang netral, tidak ada arsip yang impartial, dan tidak ada arsip yang objektif. Semuanya dibangun, dibentuk, dan dibuat untuk tujuan tertentu. Di balik setiap arsip terdapat konteks, terdapat hubungan-

⁶⁰Xiaomi, *An Integrated Approach to Records Management* (The Information Management Journal, July/August, 2003), h. 29.

⁶¹ Terry Cook, *op. cit.*, h. 23.

⁶² *Ibid.*, h. 24.

hubungan kekuasaan yang membentuk warisan sejarah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Cook sebagai berikut:

*“...Nothing is neutral. Nothing is impartial. Nothing is objective. Everything is shaped, presented, represented, re-presented, symbolized, signified, signed, constructed by the speaker, photographer, writer, for a set purpose. No text is a mere innocent by product of action as Jenkinson claimed, but rather a consciously constructed product, although that consciousness may be so transformed in to semi or even unconscious patterns of social behaviour, organization process, and information presentation that the link to external realities and power relationships is quite hidden.. Texts (which include image) all are form of narration more concerned with building consistency and harmony for the author, enhancing position and ego, conforming to organization norms and rhetorical discourse pattern, than they are evidence of acts and facts, or juridical or legal frameworks. And there is not one narrative in a series or collection of records, but many narratives, many stories, serving many purpose for many audiences, across time and space”*⁶³

Tak heran jika kemudian, Tom Nesmith menganggap bahwa postmodernisme telah menempatkan arsip pada posisi intelektual baru yang penting dalam pembentukan rekaman-rekaman, pengetahuan, budaya, dan masyarakat. *“This postmodern outlook suggests an important new intellectual place for archives in the formation of records, knowledge, culture, and societies”*.⁶⁴

2. Pandangan Postmodernisme terhadap Pekerjaan Kearsipan

Ketika postmodernisme memandang arsip sebagai sebuah proses daripada sebuah produk (*process rather than product*) dan lebih melihat arsip dalam membentuk realitas daripada membuktikan realitas (*shaping rather than documenting*), maka hal ini berimplikasi pula pada pandangan postmodernisme terhadap pekerjaan kearsipan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tom Nesmith,

⁶³ Terry Cook, *op. cit.*, h. 7.

⁶⁴ Tom Nesmith, *Seing Archives: Postmodernism and The Changing Intellectual Place of Archives* (The American Archivist, Vol. 65, Spring/Summer, 2002), h. 27.

“Some archivists have begun to outline the general application of this postmodern outlook to archival work”.⁶⁵

Dalam pandangan postmodernisme pekerjaan kearsipan lebih diarahkan pada:

- a. Bagaimana merepresentasikan realitas daripada menata bahan akuntabilitas;

Ketika pekerjaan kearsipan hanya diarahkan pada bagaimana menata bahan akuntabilitas, maka pekerjaan kearsipan hanya akan berkuat dengan arsip hasil produk administrasi yang pasif yang hanya perlu ditata dan didaftar agar mudah ditemukan kembali⁶⁶ tanpa memperhatikan bagaimana proses penciptaan dari arsip tersebut apakah tercipta secara faktual atau dibuat secara “paksa” hanya untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas. Padahal telah dikemukakan sebelumnya bahwa akuntabilitas itu sendiri sebagaimana diungkapkan oleh seorang pakar Ilmu Pemerintahan, Taliziduhu Ndraha, tidak cukup untuk membangun suatu pemerintahan yang bertanggung jawab, dibutuhkan bentuk pertanggungjawaban lain seperti *obligativeness*, dan *causativeness*. Baginya, akuntabilitas yang dapat dipenuhi dengan adanya laporan, kuitansi, dan berita acara, hanya menjawab pertanggungjawaban formal belaka, tidak menyentuh pada pertanggungjawaban substansial. Bahkan secara tegas ia menyatakan bahwa akuntabilitas semata-mata tidak menjamin terjadinya kontrol, koreksi atau pembaharuan⁶⁷. Oleh karena itu, pemenuhan tuntutan akuntabilitas melalui arsip yang diada-adakan, yang dibuat seolah-olah benar dan meyakinkan secara struktur maupun isinya tapi tidak secara kontekstual, hanya akan menciderai daya arsip dalam merepresentasikan realitas. Hal yang terpenting bukanlah bagaimana arsip itu dapat tertata dengan baik sehingga mudah ditemukan kembali untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas, melainkan adalah bahwa pekerjaan kearsipan lebih diarahkan pada bagaimana memberdayakan kemampuan arsip dalam merepresentasikan realitas dengan memastikan bahwa struktur dan isi arsip melekat pada konteksnya. Untuk itu, perhatian utama harus dimulai sejak awal penciptaan arsip dengan menganalisis

⁶⁵ *Ibid.*, h. 26.

⁶⁶ Jika penemuan kembali (*retrieval*) masih dipertahankan sebagai orientasi hasil pekerjaan kearsipan maka arsiparis harus siap menerima ancaman dari para profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih dalam mengelola sistem penemuan kembali informasi (*retrieval information system*). Selengkapnya silahkan lihat Sue Myburgh, *Records Management and Archives: Finding Common Ground* (The Information Management Journal. March/April, 2005), h. 28.

⁶⁷ Konsep mengenai akuntabilitas dapat dilihat kembali Taliziduhu Ndraha, *op. cit.*, h. 85-172.

fungsi, proses, dan transaksi yang menyebabkan arsip diciptakan (konteksnya)⁶⁸. Dengan demikian, keautentikan, keutuhan, dan keterpercayaan dari struktur, isi, dan konteks arsip dapat terjamin sehingga dapat diandalkan dalam membangun sebuah sistem administrasi pemerintahan yang bertanggungjawab. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Terry Cook bahwa yang penting adalah membentuk kembali (*reconfiguring*) fungsionalitas aktual dan juga asal-usul atau konteks “original” arsip yang memiliki kebuguhan, pada masalah inilah arsiparis harus terus meningkatkan perhatiannya, “*what will be important is reconfiguring the actual functionality and thus provenance or evidence-bearing context of the "original" record, and it is on that problem that archivists must increasingly focus their attention*”.⁶⁹

- b. Bagaimana membangun memori kolektif bangsa daripada menjaga memori kolektif pemerintah;

Ketika pekerjaan kearsipan hanya diarahkan pada bagaimana menjaga memori kolektif pemerintah yang dianggap netral dan impartial seperti yang dikemukakan oleh Jenkinson, maka pekerjaan kearsipan hanya akan berfokus tentang bagaimana menerima arsip yang distatiskan berdasarkan perspektif pemerintah, menyimpan, merawat dan menyajikannya sebagai memori kolektif bangsa⁷⁰. Padahal seperti dikemukakan sebelumnya, arsip semacam itu tidak dapat merepresentasikan memori kolektif sebuah bangsa, karena apa yang dikatakan bangsa sebagaimana dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha adalah masyarakat yang mengikatkan diri dalam sebuah nilai tertinggi yang disepakati bersama dengan sadar. Bangsa adalah puncak perkembangan suatu masyarakat, melalui proses budaya. Sudah barang tentu, proses budaya tersebut mustahil terjadi jika masyarakat yang luar biasa besar, kondisi geografiknya sangat heterogen, dan momentum perkembangannya amat pincang, seperti Indonesia, dikelola secara dan melalui skenario sentralistik (*government oriented*)⁷¹. Oleh karena itu, tantangan bagi pekerjaan kearsipan adalah bagaimana membangun memori kolektif bangsa dengan tidak lagi menekankan hanya pada satu sisi perspektif pemerintah saja tetapi juga perspektif

⁶⁸ Inilah mengapa postmodernisme mengklaim bahwa postmodernisme telah mendasari berkembangnya teori *record continuum* sebagaimana diungkapkan oleh Sue Myburgh, “*Postmodernism also is claimed to be the foundation for the continuum theory*”. lihat Sue Myburgh, *loc. cit.*

⁶⁹ Terry Cook, *op. cit.*, h. 45.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 23.

⁷¹ Selengkapnya lihat kembali Taliziduhu Ndraha, *op. cit.*, h. 30-31.

masyarakat dan interaksi yang terjadi di antara keduanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Terry Cook sebagai berikut:

*The challenge for archival science in the new century is to preserve recorded evidence of governance, not just governments governing. And the task also now includes taking archives to the people, or encouraging them to come to use archives. Archives are not a private playground where professional staff can indulge their in history or their personal interaction with historians and other scholars or, equally, their inclinations to be part of the public policy and information infrastructures of their jurisdictions; archives are sacred public trust of preserving society's memories that must be widely shared. Archivists serve society, not the state, even though they may work for an agency found within the state's bureaucracy.*⁷²

3. Pandangan Postmodernisme terhadap Arsiparis

Pergeseran pandangan mengenai pekerjaan kearsipan sebagaimana dikemukakan di atas telah mendudukan arsiparis ke dalam posisi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a. Arsiparis lebih dilihat sebagai seorang auditor daripada sebagai seorang penata;

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Glenda Acland dalam Cook, *“Needless to say, the Australian Jenkinsonians do not follow their master's stance as passive keepers and custodians of records, but rather see archivists as active interveners, even auditors, in the archival document continuum”*.⁷³

Ketika sebelumnya telah kita pahami bersama bahwa pekerjaan kearsipan lebih diarahkan pada bagaimana memberdayakan kemampuan arsip dalam merepresentasikan realitas daripada menata bahan akuntabilitas, maka perhatian utama seorang arsiparis sebagai pemangku pekerjaan kearsipan harus mampu memberdayakan arsip dalam merepresentasikan realitas, dalam menyajikan fakta yang sesungguhnya, seorang arsiparis harus dapat memastikan keautentikan, keutuhan, dan keterpercayaan dari struktur, isi, dan konteks arsip⁷⁴. Jika seorang auditor keuangan dapat dikelabui dengan arsip yang tidak merepresentasikan realitas seutuhnya, maka seorang arsiparis sebagai auditor kearsipan tidak akan

⁷² Terry Cook, *op. cit.*, h. 19.

⁷³ Terry Cook, *op. cit.*, h. 40

⁷⁴ Peran ini dijamin dalam Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

mungkin dapat dikelabui dengan arsip semacam itu, karena arsiparis tidak hanya akan berhenti pada kebenaran struktur dan isi arsip melainkan lebih menggali pada kebenaran konteks dari arsip tersebut dengan menganalisis fungsi, proses, dan transaksi yang menyebabkan arsip diciptakan (konteksnya)⁷⁵ sehingga ia dapat memutuskan apakah arsip tersebut merepresentasikan realitas atau hanya merupakan bahan akuntabilitas semu. Dalam tataran inilah peran arsiparis diharapkan dapat diandalkan dalam membangun sebuah sistem administrasi pemerintahan yang bertanggungjawab.

- b. Arsiparis lebih dilihat sebagai seorang pembangun daripada sebagai seorang penjaga;

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Cook, *“For archivists, the paradigm shift requires moving away from identifying themselves as passive guardians of an heritage legacy to celebrating their role in actively shaping collective (or social) memory”*.⁷⁶ Bahkan Tom Nesmith menegaskan, *“Seeing archives, then, means seeing archivists anew—as visible, active, agents in the construction of this history and the societal knowledge it shapes”*.⁷⁷

Ketika sebelumnya telah kita pahami bersama bahwa pekerjaan kearsipan lebih diarahkan pada bagaimana membangun memori kolektif bangsa daripada menjaga memori kolektif pemerintah, maka perhatian utama seorang arsiparis sebagai pemangku pekerjaan kearsipan harus mampu membangun sebuah memori kolektif bangsa dengan tidak lagi menekankan hanya pada satu sisi perspektif pemerintah saja tetapi juga perspektif masyarakat dan interaksi yang terjadi di antara keduanya. Oleh karena itu, arsiparis harus mampu memahami proses dari tata kelola pemerintahan (*governance*), bukan hanya perintah dari pemerintah (*government*). Tata kelola pemerintahan (*governance*) itu sendiri mencakup interaksi antara warga masyarakat dengan negara, dampak negara terhadap masyarakat, fungsi atau kegiatan masyarakat itu sendiri, juga dampak terhadap struktur yang memerintah (*governing structures*) dan birokrat yang melihat ke dalam (*inward-facing*). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Cook:

⁷⁵ Inilah mengapa postmodernisme mengklaim bahwa postmodernisme telah mendasari berkembangnya teori *record continuum* sebagaimana diungkapkan oleh Sue Myburgh, *“Postmodernism also is claimed to be the foundation for the continuum theory”*. Lihat Sue Myburgh, *loc. cit.*

⁷⁶ Terry Cook, *op. cit.*, h. 4.

⁷⁷ Tom Nesmith, *op. cit.*, h. 41.

“Archivist mainly working in national or institutional archives need to start thinking in terms of the process of governance, not just of governments governing. “Governance” include being cognizant of the interaction of citizens with the state, the impact of the state on society, and the functions or activities of society itself as much as it does the inward-facing structures of government and its bureaucrats. The archivist in appraisal, and all subsequent actions, should focus on the records of governance not just government, when dealing with institutional records. This perspective also complements better the work of archivist the work of archivist dealing personal papers or private “manuscript” archives. This citizen-state interactive relationship, I should note here, would be reflected in other jurisdictions by interaction of members with their church or union, students with a university, customer with a company, and so on. This broader “governance” perspective is not only for government archivist but all archivist.⁷⁸

Hal tersebut telah mendorong munculnya pendekatan-pendekatan kearsipan baru seperti pendekatan strategi baru akuisisi penilaian makro (*new macroappraisal acquisition strategy*) ala Booms yang merupakan cerminan nilai-nilai kemasyarakatan melalui fungsi-fungsi pencipta rekod; pendekatan filosofis Cook yang menekankan agar nilai kearsipan mesti didefinisikan sesuai dengan konstruk sosial dan fungsi-fungsi kemasyarakatan bukan semata menurut pendekatan Jenkinson dan Schellenberg; atau pendekatan “arsip total” ala Taylor yang menerapkan sudut pandang ekologis, holistik, dan spiritual.⁷⁹

Selanjutnya, Taylor secara tegas mendorong arsiparis untuk mengadopsi bentuk baru dari historiografi sosial untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa arsip diciptakan. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Cook sebagai berikut:

“Taylor encouraged archivists to adopt "a new form of 'social historiography' to make clear how and why records were created" Archivists need to do this, in Taylor's view, because, faced with incredible information overloads and technological transformations, they need to concentrate less on "dealing with individual documents and series" and more on "the recognition of forms and

⁷⁸ Terry Cook, *op. cit.*, h. 19.

⁷⁹ Selengkapnya silahkan lihat Terry Cook, *op. cit.*, h. 30-35.

*patterns of knowledge which may be the only way by which we will transcend the morass of information and data into which we will otherwise Not surprisingly, Taylor's thoughtful speculations also explicitly challenged archivists not to remain isolated in their professional cloisters or behind disciplinary walls”.*⁸⁰

Tidak mengherankan jika kemudian Xiaomi memandang arsiparis sebagai *co-creators of knowledge, culture, and society rather than just passive recipients, merely guarding and retrieving records and knowledge created entirely by others*⁸¹. Dengan demikian, arsiparis diharapkan dapat membangun rumah-rumah memori yang merepresentasikan realitas masyarakat secara akurat sebagai warisan sejarah bangsa.⁸²

G. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil dan analisis penelitian dapat kita simpulkan bahwa postmodernisme dalam kearsipan telah menghadirkan pandangan-pandangan baru terhadap arsip, pekerjaan kearsipan, dan arsiparis, sebagaimana berikut:

1. Postmodernisme lebih memandang arsip sebagai sebuah proses daripada sebuah produk (*process rather than product*) dan lebih memandang arsip dalam membentuk realitas daripada membuktikan realitas (*shaping rather than documenting*);
2. Postmodernisme lebih memandang pekerjaan kearsipan pada bagaimana merepresentasikan realitas daripada menata bahan akuntabilitas (*represent the reality rather than keep the evidential accountability*) dan lebih memandang pekerjaan kearsipan pada bagaimana membangun memori kolektif bangsa daripada menjaga memori kolektif pemerintah (*construct the nation collective memory rather than guard the government collective memory*);

⁸⁰ *Ibid.*, h. 35.

⁸¹ Xiaomi, *loc. cit.*

⁸² Konsep dasar kearsipan di Indonesia sebenarnya sudah mengadaptasi pendekatan kemasyarakatan dalam membangun memori kolektif bangsa. Hal ini terlihat dari definisi arsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan secara operasional Arsip Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis bagi Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, dan Perseorangan. Secara aktual, dalam tataran implementasi dapat kita lihat di Surat Kabar Tempo, 28 Mei 2014, h.31 tentang Penyerahan Arsip 21 Lembaga dan Masyarakat ke Arsip Nasional RI.

3. Postmodernisme lebih memandang arsiparis sebagai seorang auditor daripada seorang penata (*auditors rather than keepers*) dan lebih memandang arsiparis sebagai seorang pembangun daripada seorang penjaga (*constructors rather than guardians*).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan postmodernisme dalam kearsipan adalah:

1. Kepada masyarakat agar tidak menganggap kearsipan sebagai sesuatu hal yang tidak aktual tanpa muatan intelektual karena pada perkembangannya kearsipan justru diarahkan pada bagaimana membangun pengetahuan (*knowledge*), budaya (*culture*) dan masyarakat (*society*). Oleh karena itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadarannya terhadap kearsipan dengan mengelola arsip-arsipnya secara baik dan benar agar ketika diserahkan menjadi bagian dari memori kolektif bangsa dapat merepresentasikan realitas kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana mengelola arsip dengan baik dan benar, masyarakat dapat berkonsultasi kepada arsiparis dan atau lembaga kearsipan;
2. Kepada lembaga kearsipan agar merancang strategi yang komprehensif dalam membangun suatu sistem yang dapat mengoptimalkan daya kearsipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bangsa, dan negara;
3. Kepada komunitas kearsipan, baik praktisi maupun akademisi, agar tidak terjebak dengan tradisi lama dengan terus mempertanyakan eksistensi kearsipan secara aktual maupun intelektual dalam rangka membawa kearsipan ke arah yang lebih maju, lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Berten, Hans. 1995. *The Idea of The Postmodern: A History*. London and Newyork: Routledge.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Cook, Terry. 1997. *What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and The Future Paradigm Shift*. Archivaria, The Journal of The Association of Canadian Archivist.
- _____. 2001. *Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts*. Netherland: Kluwer Academic Publishers, Archival Science 1:3-24.
- Harvey, David. 1992. *The Condition of Postmodernity: An Enquiry in to the Origin of Cultural Change*. USA and UK: Blackwell Publisher.
- Hassan, Ihab. 1986. *Pluralisme in Postmodern Perspective*. Chicago Journal: Critical Inquiry, Vol. 12 No. 3, Spring. USA: The University of Chicago Press.
- Hicks, Stepen R. 2004. *Explaining Postmodernisme: Skepticism and Socialism from Rosseau to Focault*. USA: Scholargy Publishing.
- Jackman, Tom. 2011. *Activist, Archivist and The Limits of Postmodern Thought*. ARST 573: Archival Systems and The Profession.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 13 Juni 2013.
- Ketelaar, Eric. 1985. *Archival and Records Management Legislation and Regulations: a RAMP Study with Guidelines, For the General Information Programme and UNISIST*. Paris: Unesco.
- Liotard, Jean Francois. 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. USA: Manchester University Press.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Myburgh, Sue. 2005. *Records Management and Archives: Finding Common Ground*. The Information Management Journal. March/April.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Jilid 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nesmith, Tom. 2002. *Seing Archives: Postmodernism and The Changing Intellectual Place of Archives*. The American Archivist, Vol. 65, Spring/Summer.
- Noris, Christopher. 2003. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jaques Derrida*, Terjemahan Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Ritzer, George. 2003. *Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Muhammad Taufik. Yogyakarta: Juxtapose.
- Sugiharto, Bambang I. 1996. *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surat Kabar* Tempo, “Penyerahan Arsip 21 Lembaga dan Masyarakat”, 28 Mei 2014, h.31.
- Xiaomi. 2003. *An Integrated Approach to Records Management*. The Information Management Journal, July/August.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan.